

BAB III
PENGEMBANGAN KOLONISASI SUKADANA DI DISTRIK LAMPUNG
TAHUN 1935-1942

Sukadana dalam ejaan lama (Soekadana) merupakan *onderdistrik* dari *distrik* Lampung. Pengembangan kolonisasi Sukadana tidak lepas dari kolonisasi tahap sebelumnya, tahap percobaan Kolonisasi Gedong Tataan 1905. Kebijakan yang diambil tentu mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk para kolonis dan kegagalan sistem kolonisasi pada tahap pertama menjadi evaluasi untuk tahap berikutnya. Kolonisasi Sukadana yang dipersiapkan dengan penuh pertimbangan, menggunakan sistem baru pada pelaksanaannya yaitu dengan sistem bawon, dengan penempatan pola terpisah dari marga, perkembangan penduduk yang pesat hingga menjadikan Metro sebagai ibukota Kolonisasi Sukadana.

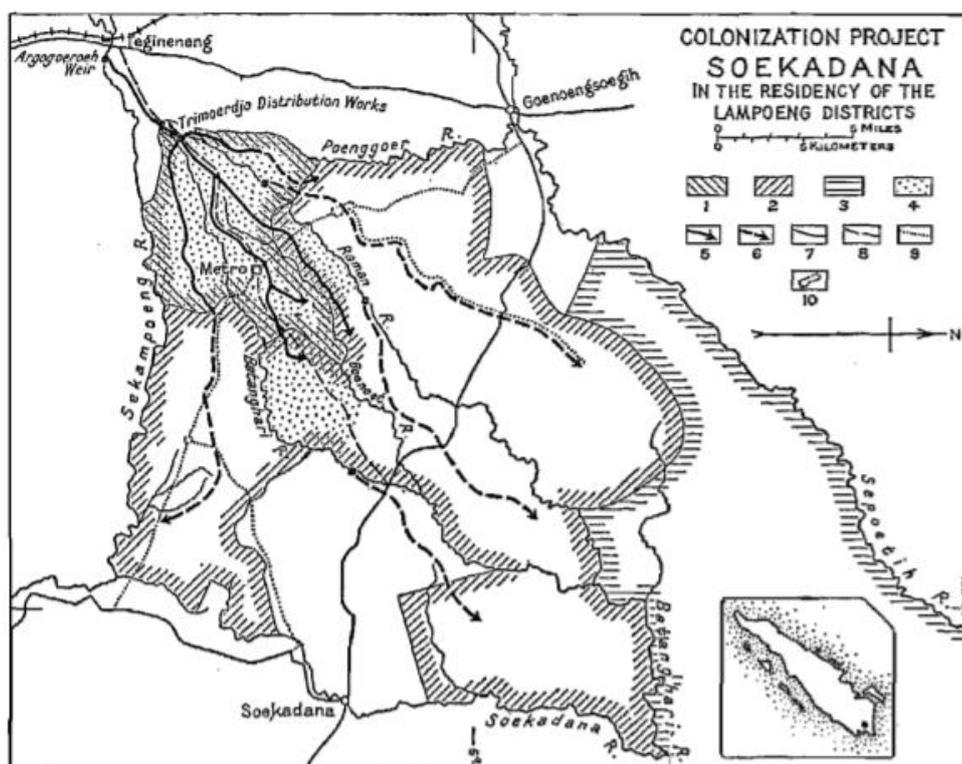
A. Kolonisasi Sistem Bawon

Dalam pembukaan kolonisasi dengan sistem bawon merupakan sistem baru dalam kolonisasi yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda, dengan semboyan *niet voor niets* (tidak ada yang cuma-cuma). Hal ini dikarenakan pada kolonisasi Gedong Tatan pada tahun 1929 para kolonis meminta kedatangan keluarga atau kerabatnya dari Jawa untuk membantu hasil panen padi mereka. Kemudian menginspirasi pemerintah untuk menjalankan kebijakan kolonisasi dengan biaya serendah-rendahnya.

Pembukaan Kolonisasi Sukadana telah menggunakan sistem yang baru yaitu "*Sistem Bawon*" (Pelzer, 1946). Kolonisasi Sukadana yang luasnya 47.000 bau dan dari luas tersebut 30.000 bau dapat diari untuk keperluan pertanian berupa sawah. Dari jumlah sebanyak 1.375 jiwa dan 12.524 jiwa, yang dikirim dalam tahun 1934 dan 1935, sebagian besar ditempatkan didaerah Sukadana (*Algemeen Handelsblad*, 1935). Sebuah induk desa dibangun dan diberi nama Trimurjo. Pada masa itu para kolonis yang telah hidup lama dan kondisi ekonominya telah membaik serta membutuhkan tenaga manusia untuk membantu memanen hasil pertanian mereka. Oleh karena itu, mereka meminta kedatangan kerabat dari Jawa, dan sebagai bantuan, mereka menyanggupi untuk menanggung perumahan dan makan kolonis baru sampai waktu panen selesai.

Selain itu, kolonis baru ini akan mendapatkan upah bawon, sebagaimana lazimnya mereka di Jawa yang dapat dipergunakan untuk membuat rumah dan

biaya kehidupan lainnya sampai mereka dapat memanen hasil sawah mereka sendiri yang diperoleh dari pemerintah. Jadi dengan alasan tersebut, pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk mengadakan perluasan kolonisasi. Menurut Pelzer, (1946: 202) untuk memotong padi para kolonis menggunakan alat potong yang disebut ani-ani, terdiri dari bilah pisau berukuran panjang 2 inci yang diikat melintang ke tongkat pendek. Penggunaan alat ini dianggap sebagai metode panen padi yang paling hati-hati, tetapi tidak ekonomis dari sudut pandang jam kerja. Namun praktiknya sudah mengakar sebagai tradisi Jawa.



Gambar 6. Peta rancangan pengembangan kolonisasi Sukadana di Distrik Lampung, pada peta tersebut terdapat simbol-simbol untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran. Sumber: Pelzer, K. J. (1948). *Pioneer Settlement in the Asiatic Tropics: Studies in Land Utilization and Agricultural Colonization in Southeastern Asia*. American Geographical Society.

Setibanya ditanah kolonisasi para kolonis-kolonis diserahkan kepada kolonis yang bersangkutan, kolonis-kolonis ini yang mengurus mereka sementara, oleh karena itu setiap permintaan kolonis yang ingin didatangkan keluarganya dari Jawa diselediki dahulu keadaannya apakah sanggup membiayai keluarganya untuk sementara waktu. Sistem kolonisasi ini merupakan jembatan untuk sistem kolonisasi sukarela besar besaran residen Lampung H.R

Rookmaker adalah pelopor untuk kolonisasi sistem ini. Pada surat kabar *De Indische courant* yang terbit 03 Maret 1936 memberitakan Raden Mulyadi yang mempunyai tugas untuk mengawal kolonisasi ke daerah Lampung, yaitu daerah Gedong Tataan, serta daerah kolonisasi terbaru yaitu Trimurjo di Sukadana. Beliau adalah wedana dari Pangkah pada catatan Raden Mulyadi menyatakan bahwa situsasi kolonisasi membuatnya terkejut. Desa dengan pepohonan dan buah-buahan yang terawat. Serta Lingkungan yang membuat terkesan akan kemakmuran.



Gambar 7. Alat potong padi yang disebut dengan ani-ani. Sumber: https://www.google.com/search?q=ani+ani&safe=strict&client=firefoxbd&sxsrf=LeKk01XC2sg49yvsG0EyKgWZpMF9SNTXA:1622559697162&source=Inms&tbmsa=X&ved=2ahUKEwip9oDz2fbwAhUdnMBHTs1Bf0Q_AUoAXoECAEQAw#imgrc=2XUn7vRaaB5j3M

Pada catatan Raden Mulyadi juga mengemukakan mengenai tanaman padi gogo lebih bagus dibandingkan dengan padi gogo Jawa. Raden Mulyadi membandingkan pertumbuhan buah yang menurutnya dua kali lipat dari Jawa. Menurut catatan Raden Mulyadi hasil padi gogo dapat mencapai 50 pikul (1 pikul kurang lebih 65 kg) padi yang sudah kering. Hasil itu tentu melebihi hasil panen padi di Tegal tempat raden Mulyadi tinggal. Jalan-jalan menuju daerah

kolonisasi bagus, bahkan para pemukim sering menggunakan sepeda yang justru hal itu sangat jarang ditemukan di Jawa.

Menurut Sjamsu (1960: 44)

Dalam pekerjaan bawon kolonis-kolonis baru diawasi oleh pengurus desa. Setiap hari pendapatan bawon harus diserahkan kepada kepala lurah supaya tidak dijual. Setiap keluarga setidaknya harus memiliki 5 pikul padi upah bawon sebelum berangkat pindah ketanah yang ditentukan baginya. Jika kurang dari 5 pikul, oleh pengurus kolonisasi diusahakan supaya keluarga itu dapat menerima secukupnya dengan jalan mengambil dari padi bawon lainya atau pemberian dari kolonis lama. Karena jika persediaan kurang dari 5 pikul, mereka akan mendapat kesukaran kelak.

Upah bawon yang mereka dapat dari kolonis lama harus dapat mencukupi kebutuhan hidup di tanah kolonis baru. Para kolonis baru harus mempersiapkan segala kebutuhannya hingga waktunya mereka dapat memanen hasil padi mereka sendiri. Upah yang didapat dari hasil membawon yaitu 1/7 sampai 1/5 bagian dari hasil panen yang didapatnya. Sesudah membawon, kolonis-kolonis baru bersama padinya ditempatkan ditanah yang telah ditentukan baginya. Selama kira-kira 14 hari para kolonis tinggal di bedeng-bedeng yang telah ditentukan sampai rumah atau pondok mereka sudah siap dihuni. Sebagai tambahan mereka juga mendapat 100 atap yang terbuat dari daun ilalalang dan rumbai yang dirangkai dan beberapa kati paku juga disediakan oleh pemerintah. Sedangkan bahan lainya mereka mencari di hutan. Setelah pohon di hutan selesai ditebang lahan mereka siap untuk dibangun rumah, setiap pemukim medapat 7.000 m² (*Koloniaal Missie Tydschrift jaargang XXII, 1939: 25*). Lahan yang diberikan diatur oleh pemerintah supaya tidak dijual terutama tahun-tahun pertama. Pejualan dilarang untuk mencegah kepemilikan tanah yang tidak merata.



Gambar 8. Hasil upah bawon padi dalam satuan pikul. Sumber: KITLV Leiden, Belanda Nomor Arsip: 53667, Jan van der Kolk.

Untuk kelancaran dan kesuksesan program ini, pemerintah Belanda melalui seorang kontrolir yang memimpin *onderafdeeling* Sukadana melakukan persiapan negosiasi dengan pihak masyarakat pribumi (Kuswono et al., 2020). Maka mulailah mereka mendirikan rumah-rumah sederhana, membuka dan menanam pekarangan masing-masing dengan palawija seperti jagung, singkong, kacang dan tanaman lain yang cepat tumbuh. Setelah padi dari upah memotong habis dimakan, mereka mulai panen palawija sendiri. Selain itu para kolonis juga menanam kelapa untuk mengisi lahannya yang juga bisa dijadikan sebagai batas kepemilikan tanah. Sudah tentu hasil palawija ini tidak cukup untuk hidup mereka sampai menunggu panen, dari padi ladang kepunyaan mereka sendiri. Oleh karena itu untuk mencukupi makan mereka sampai waktu panen padi ladang, mereka memburuh pada jawatan pekerjaan umum, atau pada *onderneming-onderneming* dan kebun-kebun lada rakyat asli.

Dalam majalah *Van Woensdag*, yang terbit pada 29 Desember, 1937, mewartakan bahwa penduduk asli Lampung pada umumnya sangat menyukai hasil pekerjaan dari para kolonis dari Jawa. Mereka sangat senang melihat hasil pekerjaan yang dilakukan orang-orang Jawa dalam mengerjakan dan mengolah sebidang tanah. Sampai-sampai mereka berfikir, tidak ada tenaga kerja lagi, kecuali hanya orang-orang Jawa. Dalam waktu *paceklik*, para kolonis mendapat bantuan dari pemerintah untuk penghidupannya (Sjamsu, 1960).

Para kolonis menerima pekarangan seluas $\frac{1}{4}$ (seperempat) bau atau setara dengan 0,19 hektar dan lahan sawah 1 (satu) bau atau setara dengan 0,75 hektar setiap keluarga. Pembangunan saluran irigasi juga dilakukan secara konsisten sesuai dengan kesepakatan para kolonis untuk melaksanakan kewajibannya, turut serta gotong royong membangun saluran irigasi sesuai dengan kuota waktu yang ditetapkan, baru kemudian diperkenankan menggarap lahan yang menjadi jatah kepemilikannya (Kuswono et al., 2020). Setelah mendapatkan tanah dan jika memerlukan peralatan pertanian dan sebagainya dianggap sebagai hutang. Para kolonis juga diwajibkan membayar kembali biaya pengangkutan mereka.

Menurut Sjamsu, (1960 : 13-14)

Dalam tahun 1935 jumlah kolonis yang dipindahkan 3.500 keluarga dengan biaya f 96.000. mencakup f 34.500 biaya kereta api, f 22.500 biaya kapal KPM, dan f 39.000 ongkoslain-lain. Untuk setiap keluarga mengeluarkan biaya (f 96.000 – f 34.500) : 3.500 = f 17.57. Masing-masing keluarga harus membayar kembali biaya pengangkutan f 12,50, sebenarnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah hanya f 17,57 - f 12,50 = f 5,07 untuk tiap keluarga. Dalam tahun 1936, rata-rata biaya yang dikeluarkan Pemerintah untuk tiap-tiap keluarga, ialah (f 108.800 - f 35.000): 3.300 = f 22,36 - f 12,50 = f 9,86. Biaya rata-rata yang dikeluarkan Pemerintah untuk satu keluarga dalam tahun 1935-1936 ada (f 96.000 - f 34.500) + (f 108.000 - f 35.000) : 6.800 = f 19,90 - f 12,50 = f 7,40. Tapi dalam praktek biaya pemindahan yang harus dibayar kolonis, menurut pengalaman residen mulai tahun 1935 tiap kepala keluarga kolonis diwajibkan membayar uang pengangkutan f 12,50. Jumlah kolonis yang dipindahkan ada 3.500 keluarga dan biayanya f 96.000. Dari jumlah ini f 34.500, biaya kereta api, f 22.500 biaya kapal KPM dan f 39.000 ongkos lain-lain di Jawa dan Lampung. Untuk tiap keluarga dikeluarkan (f 96.000 - f 34.500,) : 3.500 = f 17,57. Jika masing-masing keluarga harus mengembalikan f Lampung hanya masuk kira-kira 70 %. Ini berarti biaya yang ditanggung Pemerintah bertambah 30% dari biaya yang harus dikembalikan kolonis. Jika ini diperhitungkan, maka biaya untuk tiap keluarga dalam tahun 1935 - 1936 menjadi f 7,40 : (30% : f 12,50) = f 11,15

Penyelenggaraan kolonisasi dari tahun ketahun, selalu diusahakan untuk mengurangi biayanya sesuai dengan diberlakukanya sistem bawon yang bertujuan untuk melaksanakan program kolonisasi dengan biaya serendah-rendahnya. Selain itu para kolonis diwajibkan membayarkan pajak, menurut ordonansi pajak penghasilan tahun 1932 art. 32 sub d. Setelah 3 tahun berdiam ditanah kolonisasi barulah mereka diwajibkan:

1. Membayar pajak penghasilan. Besarnya 4% dari besar penghasilan setahun. Kolonis-kolonis yang baru dikenakan pajak, ditetapkan

penghasilannya f 50 setahun dan kolonis lainnya f 90. Jika kolonis mempunyai hewan, harus pula membayar pajak 2% dari f 25, untuk tiap sapi.

2. Selain dari pajak penghasilan, kolonis-kolonis sesudah 3 tahun ditanah kolonisasi, dikenakan juga kewajiban rodi (*heerendienstplicht*). Mereka diwajibkan dalam setahun bekerja selama 20 hari pada pekerjaan perbaikan atau pembikinan jalan dan lain dari itu mengangkut 2 m³ batu krikil.
3. Sesudah itu para kolonis diwajibkan 5 hari dalam setahun bekerja disawah atau diladang lurah desa. Tanah sawah atau ladang itu adalah pemberian Pemerintah kepada Lurah untuk nafkahnya, pengganti gaji (atau tambahan gaji).
4. Kemudian ada lagi kewajiban gugur gunung, yakni kewajiban bekerja bersama-sama jika suatu malapetaka menimpa rakyat, seperti waktu banjir, memperbaiki tanggul (gili-gili) sungai yang pecah dan sebagainya.

Dalam tahun 1937 jumlah kolonis yang dipindahkan ke Sukdana 6.176 jiwa. Selain itu telah dilakukan juga penyelidikan dan pembuatan peta atas 45.000 ha tanah di daerah Sukdana. Dari tanah ini telah terdapat seluas 30.000 ha yang dianggap baik untuk memperluas kolonisasi. Tetapi lama-kelamaan jumlah kolonis-baru yang datang, melebihi jumlah pembawon yang diperlukan tanah-tanah kolonisasi, sehingga tidak setiap kolonis baru mendapat kesempatan untuk mengambil upah dengan pekerjaan membawon. Pemerintah memberi pekerjaan lain kepada mereka yang tidak mendapat kesempatan membawon seperti menggali bendar-bendar irigasi dan lain-lain dengan menerima upah.

Dalam tahun 1939 jumlah pinjaman kolonis terpaksa bertambah besar lagi. Mereka yang tak dapat mengambil upah bawon, tidak lagi diberi pekerjaan sebagai yang dilakukan pada kolonis dalam tahun yang lalu, tetapi diberikan pinjaman padi untuk makan, banyaknya pikul 7¹/₂ dan 1 pikul padi untuk bibit. Selain itu para kolonis mendapat pinjaman yang berupa alat-alat yaitu kampak, cangkul, periuk, batu asahan, golok, gergaji, 50 atap dan 2¹/₂-3 kati paku (Sjamsu, 1960). Dengan bantuan padi ini mereka dapat mempergunakan waktunya untuk mengerjakan dan menanam tanah mereka masing-masing. Dalam pekerjaan ini mereka dapat belajar dari cara bekerja kolonis-kolonis lama dan mendapat bimbingan atau arahan dari Dinas penerangan pertanian, mereka begitu cepat beradaptasi dengan tanah garapannya. Sehingga mengenai bibit-

bibit palawija dan sayuran pemerintah tidak perlu membagikan lagi karena mereka mendapat bibit-bibit itu dengan cuma-cuma dari kolonis-kolonis lama.

Luas tanah pertanian seluruh tanah-tanah kolonisasi di keresidenan Lampung dalam tahun 1939 ada 27.703 ha. Dari jumlah tersebut 11.072 ha merupakan tanah pertanian di Sukadana (Kuswono et al., 2020). Jadi dalam waktu 5 tahun, kolonis Sukadana telah melebihi Gedong Tataan yang sudah 34 tahun diselenggarakan itu. Hal ini disebabkan sistem penjelenggaraan yang dijalankan, lebih baik dari sistem yang dilakukan sebelumnya. Bukan saja biayanya jauh lebih kecil, tetapi juga lebih mudah menarik kedatangan kolonis-kolonis dari Jawa. Dan pada akhir 1941 telah mempunyai penduduk kolonis lebih-kurang 91.000 jiwa, kira-kira dua kali sebanyak kolonisasi Gedong Tataan yang didirikan 1905 (Pelzer, 1946). Kolonisasi Sukadana ini masih dapat di perluas lagi ke daerah Pengubuan, Way Seputih, Rumbia, Punggur, Raman dan Way Jepara.

B. Penempatan Pola Terpisah Dari Marga

Kolonisasi Sukadana yang dibuka 1934 sengaja dipisahkan oleh marga asli Lampung hal ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan kolonisasi dengan kata lain kolonisasi yang masih dimasukan kedalam hubungan marga kurang berhasil. Selain itu wilayah kolonisasi Sukadana merupakan hutan adat milik marga buay nuban yang bukan daerah pemukiman padat penduduk.

Dalam pelaksanaannya pemerintah kolonial harus hati-hati karena harus berhadapan langsung dengan masyarakat pribumi Lampung. Lahan yang dibuka kemudian diberikan untuk para kolonis adalah lahan milik Dewan Marga yaitu Marga Buay Nuban (Rookmaker, 1937). Negosiasi yang dilakukan ditingkat daerah antara pemerintah kolonial dan wakil marga yang bersangkutan, menentukan batas pengembangan penempatan kolonis, dan marga-marga menyerahkan banyak lahan yang luas dengan hati terbuka. Dalam surat kabar *De Sumatra post*, yang terbit 22 September 1935, memberitakan Karena perkembangannya yang pesat maka dibangunlah sebuah induk desa baru pada tahun 1935 yang diberi nama Trimurjo. Pada tahun 1935 terdapat sekitar 12.000 jiwa yang telah datang ke Trimurjo. Namun, terdapat sumber lain yang mengatakan bahwa jumlah kolonis adalah 10.500 jiwa dengan 300 Kepala Keluarga yang datang ke Trimurjo.

Bataviaasch nieuwsblad yang terbit 07 Desember 1935, mewartakan tentang Jembatan yang terletak diatas sungai Way Sekampung dekat

Tigeneneng di jalan antara Telokbetong-Sukadana, dimana bendungan besar akan digunakan untuk pengairan kolonisasi baru di Trimurjo harus didongkrak minimal dengan ketinggian 2 meter dari ketiinggian air. Para pekerja hanya bekerja di sore dan malam hari. Hal tersebut dilakukan agar tidak mengganggu lalu lintas, terutama untuk mobil. Pekerjaan tersebut berjalan dengan sangat baik jembatan Way Sekampung dikerjakan pada desember 1935. Di tengah keterbatasan, pembangunan jembatan merupakan hal yang sulit dan membutuhkan kehati-hatian. Disamping itu juga jembatan way sekampung merupakan akses yang menghubungkan Teluk Betung dengan daerah kolonisasi lainnya seperti Gunung Sugih, Sukadana, dan Trimurjo. Pekerjaan tersebut ditargetkan selesai akhir tahun atau menjelang awal tahun 1940.

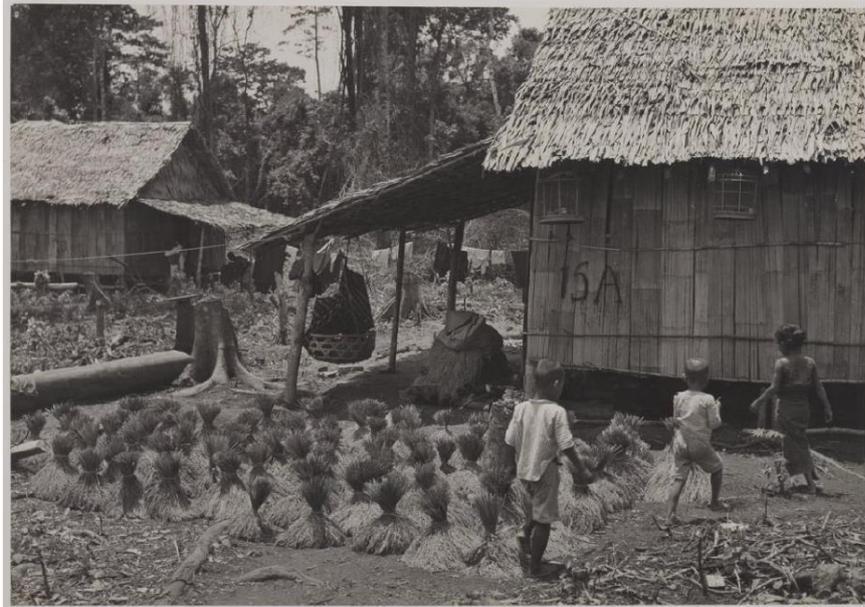
Kemudian surat kabar *Algemeen Handelsblad* yang terbit 17 Sempember 1935, memberitakan dalam waktu 5 bulan jalan sepanjang 8 km yang mengarah ke pemukiman pertama sudah dapat diakses dengan mobil. Hanya beberapa bagian kecil saja yang perlu diperbaiki. Namun, saat ini telah dikerjakan. Pemukiman ini disebut dengan "Trimurjo" yang dipimpin oleh asisten wedana di bawah kendali subdivisi Sukadana. Tempat ini telah terlihat bagus dan tertata rapih, di kanan dan kiri terlihat rumah-rumah para pemukim ditanami jagung dan kacang serta tanaman lainnya. Namun, sangat disayangkan perkebunan pada pemukiman ini dilanda kekeringan yang saat itu juga melanda sebagian besar wilayah lainnya.

Dalam tahun 1936 dipindahkan oleh Pemerintah 3.300 keluarga, dengan biaya f 108.800 (Sjamsu,1960). Dalam foto yang diambil oleh Jan Van Der Kloek pada hari jum'at tanggal 3 April 1936, para kolonis ini diberangkatkan menggunakan kapal milik pemerintah kolonial Hindia Belanda dan tiba di pelabuhan Panjang, Teluk Betung. Para kolonis kemudian diangkut menggunakan bus sewaan dari perusahaan Cina dan milik pemerintah kolonial Belanda dari pelabuhan panjang melewati Gunung Sugih dan tiba di Sukadana untuk menuju tanah harapan baru. Tanah tersebut adalah desa induk baru bernama Trimurjo yang menjadi cikal bakal berdirinya Metro. Hal ini diperkuat dengan adanya surat kabar *De Indische courant* yang terbit 03 Maret 1936 memberitakan tentang transportasi emigran terbaru ke Lampung pada tanggal 25 februari 1936 salah satunya dipimpin oleh Raden Mulyadi. Pada catatan Raden Mulyadi mengemukakan beliau mengunjungi Trimurjo yang di bangun sebuah irigasi dari sungai way Sekampung.

Pada saat itu Trimurjo baru berusia satu tahun. Panen padi gogo milik para pemukim baru terlihat sangat baik. Meskipun pada saat itu palawija mengalami kekeringan terkena kemarau panjang, namun pada panen palawija kedua para petani telah mendapatkan hasil yang memuaskan. Perkembangan daerah kolonis baru begitu pesat. Banyak pekerjaan yang berjalan sesuai rencana sehingga dalam waktu setahun telah terlihat banyak perubahan. Jalan-jalan desa ditata dengan baik. Tempat pemukim didirikan sesuai dengan desain yang dibuat sebelumnya. Sehingga banyak dari kalangan pejabat optimis bahwa Trimurjo akan jauh lebih baik dalam hal pembangunan jalan, pertanian, dan penataan, dari pada Gedong Tataan yang telah lama dibuka untuk kolonisasi. Disini para kolonis menggunakan pengalaman yang diperoleh dari kolonisasi lama. Menurut berita yang beredar pada *De Indische courant* yang terbit 03 Maret 1936 Raden Mulyadi juga mengunjungi kota Metro, kursi masa depan asisten wedana, yang saat ini tinggal di Trimurjo juga mengunjungi Batanghari. Di Trimurjo sendiri para kolonis sudah sibuk menggali saluran untuk sistem irigasi. Dengan menaiki kapal KPM, wedana melakukan perjalanan kembali ke Jawa, ia membawa semua jenis sampel, termasuk padi, wortel, semua jenis spesies pisang, nanas, umbi kubis raksasa, dll.

Kolonisasi Sukadana mempunyai 60 kelurahan. Masing-masing kelurahan mempunyai 1 atau lebih bedeng. Dan diusahakan supaya tiap kelurahan berpenduduk kira-kira 500 keluarga (*De Indische Courant*, 1936). Bedeng merupakan nama pemukiman yang orang akan menyebutnya desa di Jawa. Karena desa ini belum memiliki nama, mereka menggunakan angka untuk membedakannya, tetapi penduduk sudah tahu betul dimana nomor tempat tinggal mereka sendiri. Wilayah-wilayah bedeng dari bedeng 1-70 kemudian diresmikan menjadi desa-desa dan diberikan nama selain sebutan angka yang sudah terlanjur melekat.

Misalkan bedeng 1 disebut Adipuro, bedeng 15 disebut Iring Mulyo dan bedeng 22 di sebut Hadimulyo. Ketujuh puluh desa yang terbentuk tersebut kemudian dikelompokkan dalam 4 wilayah yang dipimpin oleh asisten wedana. Bedeng 1 sampai 20 masuk dalam wilayah asisten wedana Trimurjo. Sementara itu, bedeng 21 samapai bedeng 37 masuk ke dalam wilayah asisten wedana Pekalongan. Sedangkan bedeng 38 sampai 52 masuk dalam wilayah asisten wadana Batanghari, terakhir adalah bedeng 53 sampai 70 masuk ke dalam wilayah asisten wedana Sekampung.



Gambar 9. Rumah sementara atau disebut rumah bedeng terlihat pada dinding bertuliskan 15A yang terletak di kolonisasi Metro Sumber: KITLV Leiden, Belanda Nomor Arsip: 53643, Jan van der Kolk

Dalam surat kabar *De Telegraaf* yang terbit 07 April 1936, memberitakan bahwa di Kolonisasi Sukadana sudah ada 18 desa kecil di Barat Daya, terutama Trimurjo. Setidaknya terdapat 5.000 orang Jawa tinggal di desa ini. Trimurjo sebelum tahun 1937 merupakan tempat asistem wedana yang bertanggung jawab atas kolonisasi (Sjamsu,1960). Pejabat administrasi di Trimurjo adalah mantan asisten wedana di Gedong Tataan. Pilihan ini dianggap tepat karena sebelumnya sudah mendapat banyak pengalaman di Gedong Tataan dan sudah paham mengenai masalah kolonisasi. Dari pengalamannya tersebut akhirnya mendapat kepercayaan dari penduduk, salah satu kebijaksanaannya membawa 110 petani yang sudah berpengalaman dari Gedong Tataan ke Kolonisasi Trimurjo. Kesuksesan yang dicapai oleh pemerintah kolonial Belanda dalam menjalankan program kolonisasi yang dilakukan di Sukadana, menghasilkan semacam surat keputusan dari Dapertemen Pemerintah Kolonial Belanda yang mengharuskan adanya pembentukan sebuah kewedanaan baru di keresidenan Lampung. Bedeng 1 yang berada di wilayah asisten wedana Trimurjo menjadi usulan dalam rencana pembentukan kewedanaan baru, tetapi pada saat itu Ratu Belanda memerintahkan agar posisi kewedanaan berada ditengah-tengah, agar seluruh penduduk kewedanaan memiliki akses yang sama untuk menuju ibukota.

Berdasarkan keterangan surat yang dikirim oleh komisi pusat pada 18 November 1941 Nomor 3346/XII terdapat beberapa kebijakan bagi penduduk

Jawa yang ingin ikut program kolonisasi ke Lampung, adapun ketentuannya sebagai berikut (Kuswono et al., 2020).

1. Jumlah biaya yang harus dibayar oleh peemukim pada awal atau akhir seleksi adalah f 0,10 untuk satu orang dewasa dan f 0,05 untuk satu orang anak. Kenteuan ini diwajibkan oleh calon pemukim. Namun pemukim yang tidak mampu bisa membuat kesepakatan dengan uang muka
2. Untuk mengurus tanah kepada pemukim baru dibebankan biaya sebesar f 12,50 per keluarga. Biaya tersebut tidak termasuk transportasi para pemukim
3. Selama perjalan menggunakan kereta api, uang makan akan diberikan dalam jumlah 10 sen per orang dewasa dan 5 sen untuk seorang anak. Berlaku kelipatan apabila waktu perjalanan mencapai 2 hari
4. Keperluan makan yang memadai akan diberikan selama perjalan dmenggunakan kapal
5. Setiap keluarga pemukim menerima lahan pertanian dan perumahan setidaknya $1\frac{1}{4}$ bau yang dipastika layak untuk dijadikan perkebunan daan para petani baru
6. Para pemukim yang baru menetap akan tinggal bersama pemukim yang telah datang sebumnya atau tinggal dibangun sementara yang didirikan pemerintah sampai rumah yang dibangun siap ditempati
7. Pertama kali yang harus dilakukan oleh pemukim ketika sampai di wilayah kolonisasi adalah mengarap padi para pemukim lama atau mengikuti kegiatan untuk mendapat penghasilan. Jika hal itu tidak bisa dilakukan pemerintah akan mencukupi kebutuhan makanan namun harus diganti kembali baiayanya.
8. Alat-alat yang diperlukan untuk membuka lahan, serta alat pertanian dan beberapa peralatan dapur disediakan oleh pemerintah tetapi dianggap hutang dan mereka harus menggati biayanya setelah mendapat penghasilan.
9. Untuk membuat rumah bahan-bahan disediakan pemerintah terlebih dahulu.
10. Pemukiman desa untuk Jawa dan Madura dimasukan dibawah bimbingan langsung. Dalam pembentukan organisasi desa tersebut

tentu saja akan diambil dari komunitas yang ada di lokasi, seperti marga, lanskap, dan lainnya

11. Selama tahun pendirian dan 2 tahun berikutnya, pemukim dibebaskan membayar pajak. Setelah itu mereka harus membayar pajak yang sama dengan penduduk yang telah datang sebelumnya.
12. Biaya untuk keperluan desa diatur sesuai dengan adat yang berlaku
13. Pemulihan hutang menyangkut biaya transportasi, distribusi makanan dari pemerintah, atau penyediaan alat-alat pertanian peralatan dapur dan bahan bangunan akan mulai dibayar selambat mungkin dalam waktu 3 tahun.

Kini wilayah eks-Kolonisasi Sukadana, dalam ejaan lama (Soekadana), secara administrasi berada dalam wilayah tiga kabupaten/kota di Lampung, yakni Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan pusat ibukota kolonisasi di Metro, kini menjadi Kota Metro. Jejak kolonisasi ini masih banyak dijumpai sampai sekarang, seperti toponim dari nama daerah yaitu “bedeng” (asal kata “*bedding*”), (Amboro, 2018c, 2018b).

C. Metro Sebagai Ibu Kota Kolonisasi Sukadana

Trimurjo merupakan cikal bakal berdirinya metro karena perkembangannya yang pesat maka pada hari Rabu 9 Juni 1937 pemerintah Hindia Belanda menetapkan Metro sebagai pusat administrasi kolonisasi Sukadana, tepatnya di bendeng 15 Iring Mulyo (Kuswono et al., 2020). Disaat waktu bersamaan diresmikanya tugu “Rookmaker” yang menandakan berdirinya Metro sebagai ibukota kolonisasi Sukadana yang tetalah dipisahkan dari kewedanaan Trimurjo, didirikannya tugu “Rookmaker” bertujuan untuk mengenang keberhasilan Rookmaker dalam kolonisasi Sukadana, dan pada tahun 1937 adalah akhir dari masa jabatan Rookmeker sebagai Residen Lampung. Disiang harinya mereka melakukan pesta untuk merayakannya. Momen tersebut di dokumentasikan dalam foto yang tersimpan di *Tropenmuseum Amsterdam*, Belanda.

Nama Metro diambil dari kata Mitro, H.R Rookmaker memberikan semangat untuk perkembangan wilayah tersebut. Metro baginya adalah awal dari "Metropolis" dan seseorang pasti dapat merasakan apa yang menjadi pandangan dari Rookmaker tersebut. Orang Jawa jelas tidak dapat mengucapkan secara benar kata “Mitro” yang berarti teman ini. Mereka lebih fasih dengan kata “Metro”

(*Soebarijasch Handelsblad*, 1938). Dalam surat kabar lain memberitakan tentang Metro seperti *Soerabaijasch Handelsblad* yang terbit 20 Desember 1937, bahwa Metro bisa diakses melalui Tanjung Karang-Gunung Sugih, dan Sukadana. Metro juga mudah diakses dengan menggunakan mobil tetapi tidak ada yang tau berapa biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan fasilitas tersebut.



Gambar 10. Perseminan tugu “Rookmaker”, didirikannya tugu ini untuk mengenang jasa residen H.R Rookmaker sekaligus penanda Metro sebagai pusat pemerintahan 09 Juni 1937. Sumber: *Tropenmuseum Amsterdam*, Belanda. Nomor Arsip 30041198

Nama Metro seolah memiliki daya magnet yang kuat, menyangkut populasi kolonis yang terus bertambah dan jumlahnya ribuan. Senada dengan Sjamsu (1960: 45) yang menyatakan jumlah kolonis yang dipindahkan ke Sukadana dalam tahun 1937 ada 6.176 jiwa. Ketika tiba di Metro, akan mendapat kesan bahwa suatu waktu tempat yang bagus akan berkembang disini, sebagai dunia baru penduduk Jawa. Di komplek Sukadana (Metro), semuanya membangkitkan semangat baru yang menjadi ciri pekerjaan kolonisasi ini adalah semangat dalam mengembangkan fasilitas. Pemilihan tempat perlu dilakukan dengan cermat untuk mengembangkan pertanian, dan pelayanan kesehatan. Untuk membangun itu semua perlu disediakan lahan untuk itu mereka

melakukan penebangan dan pembakaran hutan. Perumah mulai dibangun dan permukiman penduduk mulai muncul membentuk kompleks yang lebih besar.

Lokasi yang dulunya hutan kini menjadi kawasan yang ramai penduduk, ini merupakan jeripayah dan hasil kerja keras para kolonis. Karena perkembangan yang pesat Metro dijadikan kedudukan asisten wedana dan didirikan pendopo asisten wedana dan pesanggrahan untuk wedana. Berdasarkan arsip berupa foto yang dipotret oleh Jan van der Kolk tersebar di *KITLV Leiden*, Belanda antara tahun 1935-1930 sudah ada Villa Hanje yang dibangun untuk singah sementara tamu undangan dari Distrik lain. Nama Hanje sendiri diambil dari nama anak dari residen Rookmaker. Pada saat itu, Metro sendiri sudah memiliki seorang *controller* (kontrolir), insinyur dan dokter pemerintah. Dalam tahun 1938 di Metro telah dibuka 2 klinik.

Klinik-klinik itu dipimpin oleh mantri juru rawat dari Departemen Kesehatan dan satu klinik kepunyaan Roomsche Katholieke Missie. Sebelum itu telah didirikan juga sebuah rumah sakit di Metro kepunyaan RK Missie. Berdasarkan data *Centrale Commissie voor Migratie en Kolonisatie van Inheemschen Metro* memang telah direncanakan dan dipersiapkan sebagai sebuah ibukota Kolonisasi Sukadana yang memiliki basis pertanian dengan potensi luas wilayah yang dapat dialiri irigasi hingga ± 55.000 hektar. Dalam sumber lain juga menjelaskan Sjamsu (1960: 47) pada tahun 1939 di ibukota kolonisasi Sukadana, yaitu Metro, dibuka suatu kebun bibit oleh jawatan penerangan pertanian seluas 17 ha, dari kebun bibit ini para kolonis bisa mendapat bibit palawija dan buah-buahan untuk keperluannya. Selain itu, ada peluang yang sangat luas bahwa gudang penyimpanan untuk garam akan dibangun tahun ini, tetapi bagaimanapun juga tahun berikutnya.

Dalam perkembangannya Metro mempunyai pasar yang besar, dikenal dengan pasar baroe Metro juga memiliki alun-alun di tengah kota. Di Metro juga sudah ada toko milik etnis Cina bernama toko baroe Tjhoë yang menandakan perekonomian di Metro sudah cukup baik pada saat itu. Dalam tahun 1941 sudah ada kantor pos, pos polisi, pesanggrahan, masjid, pom bensin dan penerang listrik. Mengenai kesehatan dalam tahun 1941 sudah terdapat 2 orang dokter, 13 mantri jururawat, 1 mantri malaria, 80 pembagi kinine, pembantu klinik dan 1 bidan. Dalam bidang pendidikan antara tahun 1938-1941 di Metro telah berdiri sekolah rakyat dan sekolah muhammadiyah.

Dari uraian di atas tergambar jelas perkembangan Metro sebagai ibukota kolonisasi Sukadana yang dahulunya hutan kini berbuah menjadi Metro sebagai pusat dunia Jawa baru. Nama itu mengingatkan kita pada "Metropolis" dan begitulah seharusnya itu dimaksudkan oleh residen Rookmaker, orang yang berperan besar dibalik rencana dan pelaksanaan kolonisasi ini. Rencananya sebagian besar menjadi Pedoman dan diikuti oleh para penggantinya bahkan prinsip-prinsipnya ini telah terbukti eksperimental.

D. Segi Pedagogis

Kolonisasi Sukadana yang dipersiapkan dengan penuh pertimbangan, menggunakan sistem baru pada peksaannya yaitu dengan sistem bawon, dengan pembangunan pola terpisah dari marga, perkembangan penduduk yang pesat hingga menjadikan Metro sebagai ibukota Kolonisasi Sukadana. Dengan memahami pengembangan kolonisasi Sukadana di distrik Lampung tahun 1935-1942. Sebagai sumber pembelajaran, memiliki nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran sejarah. Nilai karakter selalu melekat dalam sejarah sebagai pesan moral dari masa silam untuk kehidupan yang lebih baik ke masa depan. Maka dapat diambil suatu nilai pedagogis dari situasi dan kondisi tersebut, adapun nilai pedagogisnya adalah sebagai berikut:

1. Peduli sosial, sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Dalam pelaksanaan kolonisasi di Sukadana yang menggunakan sistem bawon, para kolonis lama membutuhkan tenaga bantuan untuk memanen hasil pertanian padi mereka. Selain mendapatkan upah dari membawon para kolonis baru mendapat bibit-bibit tanaman pertanian dengan cuma-cuma dari kolonis-kolonis lama. Sebagai tambahan mereka juga mendapat 100 atap yang terbuat dari daun ilalalang dan rumbai yang dirangkai dan beberapa kati paku juga disediakan oleh pemerintah kolonial. Untuk kelancaran dan kesuksesan program ini, pemerintah Belanda melalui seorang kontrolir yang memimpin *onderafdeeling* Sukadana melakukan persiapan negosiasi dengan pihak masyarakat pribumi Lampung yaitu marga buay nuban dan waktu paceklik, para kolonis mendapat bantuan dari pemerintah untuk penghidupannya.
2. Menghargai prestasi, sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui,

serta menghormati keberhasilan orang lain. Pada pengembangan kolonisasi Sukadana yang menggunakan sistem bawon hingga samapi terbentuknya sebuah ibukota di kolonisasi Sukadana merupakan, hasil perjuangan keras para kolonis. H.R Rookmaker adalah pelopor untuk kolonisasi sistem ini. Didirikannya tugu “Rookmaker” bertujuan untuk mengenang keberhasilan Rookmaker dalam kolonisasi Sukadana, dan pada hari Rabu 9 Juni 1937 adalah penetapan Metro sebagai kolonisasi sukadana sekaligus akhir dari masa jabatan Rookmaker sebagai Residen Lampung.

3. Mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Setelah membuka lahan dengan cara menebang pohon di hutan baru mulailah mereka mendirikan rumah-rumah sederhana, membuka dan menanam pekarangan masing-masing dengan palawija seperti jagung, singkong, kacang dan tanaman lain yang cepat tumbuh. Setelah padi dari upah memotong habis dimakan, mereka mulai panen palawija sendiri. Selain itu para kolonis juga menanam kelapa untuk mengisi lahannya yang juga bisa dijadikan sebagai batas kepemilikan tanah. Sudah tentu hasil palawija ini tidak cukup untuk hidup mereka sampai menunggu panen, dari padi ladang kepunyaan mereka sendiri. Oleh karena itu untuk mencukupi makan mereka sampai waktu panen padi ladang, mereka memburuh pada jawatan Pekerjaan Umum, atau pada *onderneming-onderneming* dan kebun-kebun lada rakyat asli.